

# RI dan Tiongkok Berkomitmen Selesaikan KA Cepat Tepat Waktu

Oleh Thresa Sandra Desfika

► JAKARTA - Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Indonesia berkomitmen menyelesaikan proyek pembangunan Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung tepat waktu. Komitmen ini diungkapkan dalam pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Tiongkok.

Dalam keterangan resmi di website Kementerian Luar Negeri (Kemenu) RRT dijelaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam program *Belt and Road Initiative* (BRI). Kedua pihak sepakat akan meningkatkan kerja sama untuk menyelesaikan proyek kereta cepat tepat waktu.

"Kedua belah pihak akan lebih menyelaraskan BRI dan visi Poros Maritim Global untuk memastikan penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal," jelas keterangan Kemenu Tiongkok dikutip dari website resmi fmprc.gov.cn, Selasa (8/6).

Dalam keterangan resmi tersebut diungkapkan bahwa saat selesai nanti, Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjadi tolak ukur proyek dalam koridor BRI fase pertama yang dibangun atas kerja sama kedua negara.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilaksanakan pada akhir 2022 dan setelah itu langsung dioperasikan. Progres pembangunan proyek sepanjang 142 kilometer (km) itu sudah mencapai 73%.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat meninjau Tunnel #1 Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kota Bekasi, Jawa Barat pada 18 Mei lalu. Ketika itu Kepala Negara didampingi Duta Besar Republik Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.



Luhut Binsar Pandjaitan

"Saya melihat progres sampai hari ini, tadi dilaporkan kepada saya, telah selesai 73%. Dan nanti tahun depan awal sudah masuk ke persiapan untuk beroperasi. Dan diharapkan nanti di akhir tahun 2022 Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah bisa diujicoba, dan tentu saja setelah uji coba langsung masuk ke operasional," ungkap Presiden Jokowi ketika itu.

Adapun PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menargetkan seluruh terowongan atau *tunnel* bisa diselesaikan pada akhir tahun ini. Sejauh ini KCIC baru menyelesaikan delapan dari 13 *tunnel* yang ada di Jalur di Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi per minggu ini sudah delapan terowongan yang tembus dan targetnya di akhir tahun semua terowongan selesai. Jadi target menuju masa operasi di akhir tahun depan," kata Direktur KCIC Allan Tandiono dalam laporannya kepada Presiden. Allan mengatakan, Tunnel 1 Ha-

lim Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 1.885 meter atau 1,8 km yang berlokasi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 5+500 menjadi pertama yang diresmikan. *Tunnel* ini juga menjadi satu-satunya terowongan yang menggunakan *tunnel boring machine* (TBM) sama seperti di MRT Jakarta.

"Ini terowongan pertama yang paling dekat dengan Jakarta. Tapi TB-M-nya *size-nya double*. Ini 13,19 meter dan terbesar yang pernah beroperasi di Indonesia. Dan sudah terbukti, dan diberikan sertifikat oleh MURI. Dan tadi Bapak (Presiden) sudah *video conference* dengan rekan kami di Tunnel 6 yang merupakan tunnel yang terpanjang, 4,4 kilometer di Kereta Cepat Jakarta-Bandung," jelas Allan.

Dia menambahkan, *timeline* waktu pengerjaan untuk pembangunan *tunnel* yang panjangnya 1,8 km ini memakan waktu selama 14 bulan. Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan melakukan *finishing* untuk pembukaan.

## LRT Hampir Rampung

Pada bagian lain, pembangunan *Light Rail Transit*/LRT Jabodetabek hampir rampung. Saat ini, pembangunannya sudah mencapai 84,6% dan ditargetkan dapat dioperasikan pada 2022.

"Harapannya LRT ini bisa dioperasikan tahun depan. Sebagian sarana dan prasarana sudah selesai. Kami ingin mempersiapkannya dengan waktu yang cukup, untuk melakukan uji dinamis. Aspek keselamatan sangatlah penting bagi angkutan massal di Indonesia," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam pernyataan resminya kemarin.

Menhub Budi meninjau proyek LRT Jabodetabek didampingi Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Direktur Utama Adhi Karya Entus Anawati Mukhsin, dan sejumlah pejabat terkait. Menhub pun sempat menjajal langsung LRT tersebut dari Stasiun TMI menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur. Kemudian, dengan rute yang sama kembali ke Stasiun TMI. Menhub Budi ingin mengecek kesiapan LRT Jabodetabek, yang rencananya bakal dilihat langsung Presiden Joko Widodo besok (Rabu, 9/6).

Pembangunan LRT Jabodetabek adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah lalu lintas wilayah perkotaan, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

"Tidak hanya itu, pembangunan LRT ini juga memberi kesempatan bagi anak bangsa untuk mempelajari teknologi angkutan massal kereta api," ucap Menhub.

Pembangunan LRT Jabodetabek Tahap 1 terdiri atas beberapa lintasan. Rinciannya, pertama, lintas pelayanan rute Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 km yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8%. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang

11 km, yang saat ini mencapai 84,3%. Dan, ketiga, lintas pelayanan rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 km, yang saat ini mencapai 90,9%.

Selain tiga lintasan tersebut, saat ini juga tengah dibangun Depo LRT Jabodetabek berlokasi di Bekasi Timur. Pembangunannya telah mencapai 44,1%. LRT Jabodetabek nantinya memiliki 18 titik stasiun pemberhentian. Dalam kondisi normal, satu rangkaian LRT dapat mengangkut 740 orang pe-

numpang. Dalam kondisi padat dapat mengangkut 1.308 orang penumpang. Kecepatan maksimalnya dapat mencapai 80 kilometer per jam.

Beberapa keunggulan LRT, antara lain waktu tempuh bisa lebih cepat dibandingkan kendaraan pribadi atau bus. LRT dapat menempuh rute Bekasi Timur hingga Dukuh Atas dalam waktu 45 menit. Sedangkan dari Cibubur hingga Dukuh Atas waktu tempuh hanya 39 menit.

## Linknet

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") PT LINK NET Tbk

Pada hari Senin, 7 Juni 2021 di BeritaSatu Plaza Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 12950, telah diselenggarakan RUPST PT Link Net Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

**I. Kehadiran Manajemen Perseroan**  
RUPST dihadiri oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:  
Bapak Marlo Budiman - Presiden Direktur; dan  
Bapak Victor Indajang - Direktur

**II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.  
3. Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.  
4. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020.  
6. Persetujuan atas rencana perubahan alamat Perseroan.

**III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**  
RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.337.165.288 saham yang mewakili 84,939% dari 2.751.580.984 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 2.863.195.484 saham dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 111.614.500 saham.

**IV. Kesempatan Tanya Jawab**  
Sewaktu membicarakan setiap Agenda RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap Agenda RUPST yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**V. Mekanisme Pengambilan Keputusan**  
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara secara langsung dalam meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**VI. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
1. a. Menenerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.  
b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurangan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: **Setuju** - 2.336.006.788 (99,9504%); **Abstain** - 1.158.500 (0,0496%); **Tidak Setuju** - 0 (0%)  
2. a. Menetapkan pemberian wewenang dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).  
b. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp282.587.367.057,- (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh tujuh Rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2021, pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp102,7 (seratus dua koma tujuh Rupiah) per saham per tanggal Rapat ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:  
- *Cum Dividen* Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 15 Juni 2021;  
- *Ex Dividen* Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 16 Juni 2021;  
- *Cum Dividen* Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 17 Juni 2021;  
- *Ex Dividen* Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 18 Juni 2021.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 9 Juli 2021.  
c. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp659.019.589.398,- (enam ratus lima puluh sembilan milyar sembilan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Rupiah) dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: **Setuju** - 2.337.163.288 (99,9999%); **Abstain** - 2.000 (0,0001%); **Tidak Setuju** - 0 (0%)  
3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) selaku Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.  
b. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: **Setuju** - 2.320.057.044 (99,2680%); **Abstain** - 2.000 (0,0001%); **Tidak Setuju** - 17.106.244 (1,7319%)  
4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: **Setuju** - 2.312.949.488 (98,9639%); **Abstain** - 3.400 (0,0001%); **Tidak Setuju** - 24.212.400 (1,0360%)  
5. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.  
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikuculkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: **Setuju** - 1.970.776.706 (84,3234%); **Abstain** - 2.000 (0,0001%); **Tidak Setuju** - 366.386.582 (15,6765%)  
6. a. Menyetujui perubahan alamat domisili Perseroan yang semula berada di BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan menjadi Centennial Tower Lantai 26 Unit D, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan.  
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau kepada Bapak Marlo Budiman untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon persetujuan dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikuculkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: **Setuju** - 2.337.163.288 (99,9999%); **Abstain** - 2.000 (0,0001%); **Tidak Setuju** - 0 (0%)

Selain Ringkasan Risalah RUPST ini, Direksi Perseroan dengan ini mengemukakan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 15 Juni 2021 17 Juni 2021
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )	• Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai 16 Juni 2021 18 Juni 2021
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	17 Juni 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	9 Juli 2021

Sesuai dengan keputusan dalam Agenda Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp282.587.367.057,- (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh tujuh Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp102,7 (seratus dua koma tujuh Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020:

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 17 Juni 2021.
- Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 17 Juni 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/PT Sharestar Indonesia ("BAE") dengan alamat BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950 sebelum tanggal 17 Juni 2021 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 17 Juni 2021, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 9 Juni 2021  
PT Link Net Tbk  
Direksi



## Pemulihan Internet di Papua

Direktur Utama PT Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memberikan keterangan kepada wartawan terkait putusnya kabel laut fiber optik ruas Biak-Jayapura di Jakarta, Senin (7/6/2021). Pemerintah dan Telkom saat ini masih melakukan penanganan pada putusnya kabel laut akibat faktor alam yang berdampak pada total trafik dari normal sistem komunikasi di seluruh Papua sekitar 154 gbps dari total trafik di Papua 464 gbps atau terdampak sepertiga dari total trafik.

## Kabel Laut di Papua Putus Akibat Faktor Alam

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan bahwa putusnya jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Biak-Jayapura yang mengakibatkan gangguan layanan telekomunikasi (telko) di sejumlah kota dan kabupaten di Papua sejak 30 April lalu akibat faktor alam.

Namun, putusnya SKKL itu tidak sampai mengakibatkan gangguan total layanan telko di seluruh wilayah Papua. Sejumlah wilayah yang terdampak layanan telekomunikasinya adalah Kota Jayapura, Abepura, Sentani, dan Sarmi.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pun telah memberangkatkan *Cables-hip* DNEK Pacific Link (DPL) untuk menyambungkan Sumatera Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Jayapura tersebut secepatnya. Posisi kabel ada pada posisi 280 kilometer dari Kota Biak dan 4.050 meter di bawah permukaan laut (Mdp).

"Gangguan infrastruktur telekomunikasi di Papua murni karena putusnya sistem komunikasi kabel laut yang diduga diakibatkan oleh faktor alam," ujar Johnny, dalam pernyataannya, dikutip Selasa (8/6).

Menurut dia, putusnya kabel laut tersebut telah berdampak pada kehilangan sekitar 154 Gbps dari total trafik normal sistem komunikasi di seluruh Papua sebesar 464 Gbps. Atau, layanan terdampak sekitar sepertiga dari total trafik normal.

"Saya perlu tekankan ini, karena ada kesan, seolah-olah putusnya kabel tersebut mengaibatkan total *black out* di Papua. Yang betul, terdapat 154 Gbps dari total 464 Gbps. Dan, area terdampak gangguan pada empat

titik, yaitu Kota Jayapura, Abepura, Sentani, dan Sarmi. Bukan seluruh Papua," imbuhnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun terus berkoordinasi dengan Telkom untuk pemulihan jaringan dan layanan di wilayah terdampak.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Telkom, telah dilakukan langkah mitigasi langsung melalui aktivasi jaringan *back-up* secara bertahap, dimulai dari layanan suara hingga layanan data yang menyesuaikan ketersediaan *bandwidth*," jelas Johnny.

Pada 17 Mei 2021, jaringan *back-up* telah mencapai total kapasitas 4,7 Gbps, ditunjang oleh pemanfaatan *link* satelit sebesar 2.662 Mbps, *radio long haul* Palapa Ring Timur sebesar 500 Mbps, dan *radio long haul* Sarmi-Biak sebesar 1.600 Mbps.

"Untuk mengamankan kualitas layanan pada saat proses penyambungan, Telkom juga menyediakan *backup link*, khususnya untuk wilayah Manokwari dan Biak sebesar 40 Gbps melalui Palapa Ring Timur," tambah Johnny.

Sebagai upaya pemulihan jangka pendek terhadap SKKL ruas Biak-Jayapura yang terputus, proses penyambungan kabel dan identifikasi penyebab putusnya kabel telah diusahakan sejak 1 Mei 2021 menggunakan kapal khusus.

Sebelumnya, Telkom sempat menargetkan penyelesaian perbaikan pada 7 Juni 2021. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi saat proses penyambungan kabel. Salah satunya faktor cuaca, yaitu adanya Siklon Tropis Choi-Wan yang mengganggu kecepatan kapal.

"Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, Telkom telah memulai pembangunan jalur baru kabel laut Jayapura-Sarmi-Waisai sepanjang 1.141 kilometer," ungkap Johnny.

## Pemulihan Layanan

Sementara itu, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan *back-up* secara bertahap untuk mengatasi masalah layanan telko di sejumlah wilayah di Papua akibat gangguan tersebut.

*Back-up* yang disiapkan terutama untuk mengaktifkan layanan telepon (*voice*) yang langsung *ter-cover* sejak tanggal 30 April lalu sekitar pukul 22.30 WIB. Telkom juga menambah *back-up* dari layanan satelit maupun *microwave* dan juga fiber optik. Pada tanggal 17 Mei, trafik pun naik menjadi 4,7 Gbps.

"Seluruh layanan sebelumnya sudah *recovery*, tapi kapasitasnya, atau *speed* belum kembali normal karena keterbatasan kapasitas *back-up* hanya 4,7 Gbps," jelas Ririek.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Jerry A Yudianto menyampaikan bahwa layanan telko di wilayah Jayapura, Papua, perlahan mulai pulih. "Kurang lebih tadi (Selasa, 8/6), pukul 12.30 WIB, atau 14.30 WIT, jaringan pelan, namun pasti sudah mulai berjalan," ujar Jerry, seperti dikutip Antara.

Trafik layanan Astinet Telkom di wilayah Jayapura disebutnya meningkat hingga 70% dari kuota tersedia. Layanan pun diharapkan bisa kembali normal karena gangguan telah berlangsung lebih dari satu bulan. (man)

Antara